

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jambi terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bawaslu telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam mengawasi proses pemilu dan menanggulangi pelanggaran yang terjadi. Bawaslu Kota Jambi memiliki mekanisme pengawasan yang komprehensif, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, untuk memastikan bahwa proses pemilihan legislatif berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara aktif baik dalam bentuk pemantauan langsung, pelaporan masyarakat, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Namun, efektivitas pengawasan ini masih dipengaruhi oleh berbagai kendala yang perlu diperhatikan. Meskipun pengawasan oleh Bawaslu Kota Jambi terbukti efektif dalam mendeteksi dan menanggulangi pelanggaran pemilu, terdapat beberapa tantangan yang menghambat kelancaran proses pengawasan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya jumlah pengawas di tingkat bawah, yang menyebabkan kurangnya pemantauan langsung di beberapa daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan anggaran juga mempengaruhi kemampuan Bawaslu dalam mengoptimalkan pengawasan secara menyeluruh. Meskipun demikian, Bawaslu telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pengawasan

melalui pelatihan untuk pengawas dan meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait.

2. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif. Masyarakat yang aktif dalam melaporkan pelanggaran dapat membantu Bawaslu dalam mendeteksi pelanggaran lebih cepat dan mengurangi kesenjangan informasi di lapangan. Namun, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, seperti melalui kampanye edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam pemilu.

Secara keseluruhan, meskipun Bawaslu Kota Jambi telah melaksanakan pengawasan dengan baik, masih ada ruang untuk perbaikan. Diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, serta peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, pengawasan terhadap pelanggaran Pemilihan Legislatif di Kota Jambi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pemilu yang lebih bersih, jujur, dan adil.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jambi terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan baik

bagi Bawaslu maupun masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.

1. Bawaslu, disarankan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengawasan pemilu, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Penambahan jumlah pengawas dan pelatihan yang lebih intensif akan meningkatkan kemampuan pengawas dalam mendeteksi pelanggaran secara cepat dan tepat. Selain itu, Bawaslu juga perlu memanfaatkan teknologi informasi lebih maksimal dalam pengawasan, seperti penggunaan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dengan lebih mudah dan cepat. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, KPU, dan Pemerintah Daerah juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan efektif dan transparan.
2. Masyarakat, disarankan untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu, baik dengan cara melaporkan pelanggaran yang mereka temui ataupun dengan ikut serta dalam kampanye edukasi tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil. Kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam pengawasan sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, seperti politik uang dan kampanye di luar jadwal. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu perlu ditingkatkan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, kegiatan sosial, dan program penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen

masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus lebih memahami prosedur pelaporan pelanggaran dan dampak dari pelanggaran tersebut agar dapat mengambil tindakan yang tepat saat menemui ketidakberesan dalam pelaksanaan pemilu.